

15. URUSAN PERSANDIAN

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Urusan Persandian pada tahun 2020 diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pencapaian urusan Persandian berjumlah total Rp20.000.000,00 dan setelah perhitungan APBD terealisasi sebesar Rp11.153.400,00 atau mencapai 55.77%. Belanja urusan Persandian bisa diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III.B.15. 1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Persandian Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	20.000.000	11.153.400	55.77
1	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	20.000.000	11.153.400	55.77

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah

Pada program ini yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas manajemen risiko untuk mengurangi kelemahan dan menurunkan potensial ancaman dan risiko yang terkait dengan teknologi informasi, sehingga kemudian dapat dilakukan proses untuk meredakan risiko (risk mitigation), serta melakukan kontrol dan evaluasi.

c. Capaian Kinerja

Penyelenggaraan persandian yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah adalah upaya untuk menanggulangi kerawanan terhadap data dan informasi. Kegiatan persandian diarahkan untuk menjaga keamanan informasi di 5 area. Capaian kinerja urusan persandian berdasarkan pada indikator RPJMD 2016-2021, terdiri dari tiga indikator yang mencapai target tahun 2020 yaitu rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian telah sepenuhnya tercapai.

Tabel III.B.15. 2

Capaian Kinerja Urusan Persandian Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	1	0,8	1	125 %	ST	0.8
2	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	1	0,85	1	117.65%	ST	0.9
3	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	1	0,9	1	111.11 %	ST	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Apabila ditinjau dari tabel di atas, juga dapat diketahui bahwa Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan telah sepenuhnya tercapai, dimana semua perangkat daerah telah melakukan pengamanan

III.B.15. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian

setiap jenis informasi yang wajib diamankan. Pada penyusunan RPJMD selanjutnya indeks keamanan informasi (KAMI) ini digunakan untuk mengukur pencapaian Urusan Persandian.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Urusan Persandian di Tahun 2019 DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan Rekomendasi/catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019. Namun demikian urusan ini di tahun 2020 dianggarkan untuk proses identifikasi resiko dan memitigasi resiko keamanan informasi dengan meningkatkan kapasitas manajemen resiko.

e. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan dalam melaksanakan urusan Persandian, yaitu:

Tabel III.B.15. 3

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Persandian

No	Permasalahan	Solusi
1	Kepedulian penanganan 5 area keamanan informasi.	▪ Menjadikan Indeks Keamanan informasi sebagai alat ukur pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ▪ Melakukan penilaian mandiri untuk mengukur tingkat keamanan di setiap area keamanan informasi pada masing-masing Perangkat Daerah. ▪ Menjalankan <i>road map</i> implementasi keamanan informasi yang sudah disusun. ▪ Mengamankan informasi pada Tata Naskah Dinas Elektronik dengan sistem (<i>e-Sign</i>) ▪ Melibatkan institusi terkait untuk melakukan penilaian Keamanan Informasi (KAMI) seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).